

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Pilah Sampah di Kota Semarang telah melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kelurahan, berperan sebagai fasilitator dan pendamping program, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga serta pengelolaan bank sampah. Secara umum, pelaksanaan program telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi masyarakat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan Integrated Sustainable Waste Management (ISWM), pelaksanaan program pilah sampah di Kota Semarang masih menunjukkan berbagai kesenjangan pada tingkat sistem. Dari dimensi pemangku kepentingan, program ini telah melibatkan aktor utama seperti pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan sektor swasta dan sektor informal secara formal dalam sistem pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor dalam program masih bersifat parsial

dan belum membentuk sistem pengelolaan sampah yang benar-benar terintegrasi.

Dari dimensi elemen sistem dalam kerangka ISWM, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dengan sistem pengangkutan dan pengelolaan di tingkat hilir. Meskipun kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah mulai meningkat, ketidaksinkronan antara pemilahan di hulu dan pengelolaan di hilir menyebabkan program belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Jatibarang. Dengan demikian, efektivitas program masih lebih terlihat pada perubahan perilaku masyarakat dibandingkan pada dampak makro terhadap sistem pengelolaan sampah kota secara keseluruhan.

Selain itu, dari dimensi aspek keberlanjutan dalam ISWM, pelaksanaan program pilah sampah masih menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan dan sosial-budaya. Kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan yang belum merata, keterbatasan data timbulan sampah di tingkat lokal, serta partisipasi masyarakat yang masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti PKK dan pengelola bank sampah menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya memiliki fondasi kelembagaan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Program Pilah Sampah di Kota Semarang telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip *good governance*, namun pelaksanaannya masih berada pada tahap

awal dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Analisis menggunakan pendekatan ISWM menunjukkan bahwa kelemahan utama program tidak hanya terletak pada aspek tata kelola, tetapi juga pada belum terintegrasinya seluruh elemen sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari keterlibatan pemangku kepentingan, keselarasan alur pengelolaan sampah, hingga aspek keberlanjutan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan pada ketiga dimensi utama ISWM menjadi prasyarat agar program pilah sampah tidak hanya berhenti pada perubahan perilaku masyarakat, tetapi dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Semarang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun mekanisme publikasi rutin mengenai perkembangan program pilah sampah, misalnya melalui laporan triwulan yang diunggah pada situs resmi pemerintah kota dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan terpadu yang mengintegrasikan data dari kelurahan, bank sampah, dan aplikasi SIM PKK, serta pemerataan penyediaan sarana pemilahan sampah.
2. Diperlukan pendampingan yang lebih intensif oleh pihak kelurahan terhadap masyarakat, khususnya pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Kelurahan juga perlu melibatkan kelompok muda agar kegiatan

pilah sampah tidak hanya bergantung pada kelompok tertentu dan keberjalanan program dapat berkelanjutan.

3. Masyarakat diharapkan mulai meningkatkan kesadaran dari diri sendiri dan menumbuhkan konsistensi dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah, serta aktif memanfaatkan forum komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan masukan dan kendala pelaksanaan program.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak ekonomi dari program pilah sampah serta efektivitas sistem pengangkutan sampah terpilah untuk melihat keberlanjutan program secara lebih komprehensif.